

SKRIPSI



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI AD (studi Odmil III-16 Makassar tahun 2010-2012)

OLEH :

**NURHASA SYAMHADI JAYA
B 111 09 076**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

Halaman Judul

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI AD
(studi Odmil III-16 Makassar tahun 2010-2012)**

**Oleh:
NURHASA SYAMHADI JAYA
B111 09 076**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Sarjana pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDAN ASUSILA
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI ANGKATAN DARAT

(Studi Odmil III-16 Makassar Tahun 2010-2012)

Disusun dan diajukan oleh:

NURHASA SYAMHADI JAYA

B 111 09 076

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam

Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

pada, 2013

PANITIA UJIAN

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Aswanto, S.H., m.S., MDF
NIP. 19641231 198811 1 001

Hijrah Adhyanti M. SH.,MH
NIP. 19790326 200812 2 002

Dekan

Prof. Dr. Aswanto, S.H., m.S., MDF
NIP. 19641231 198811 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : **NURHASA SYAMHADI JAYA**

Nomor Induk : **B111 09076**

B a g i a n : **Hukum Pidana**

Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK
PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM TNI ANGKATAN DARAT (studi Odmil III-16
Makassar tahun 2010-2012)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Seminar Hasil
Penelitian

Makassar, Oktober 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Aswanto, S.H., m.S., MDF
NIP. 19641231 198811 1 001

Hijrah Adhyanti M. SH.,MH
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN NENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa akripsi mahasiswa :

Nama : NURHASA SYAMHADI JAYA

No. Pokok : B111 09 076

B a g i a n : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana
Asusila yang dilakukan oleh Oknum TNI
Angkatan Darat

(studi Odmi III-16 Makassar tahun 2010-
2012)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai akhir
program studi.

Makassar, oktober 2013

a.n. D e k a n

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

NURHASA SYAMHADI JAYA (B111 09076), Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh Oknum TNI Angkatan Darat (studi Odmil III-16 Makassar tahun 2010-2012), dibawah bimbingan Prof. Dr. Aswanto SH, MS.,DFM selaku pembimbing I dan Hijrah Adhyanti M. SH., MH. selaku pembimkbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat, dan kedua untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat.

Penelitian ini dilaksanakan di Oditurat Militer III-16 Makassar, Polisi Militer Kodam VII/Wirabuana Dan Detasemen Polisi Militer VII/6. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*), dengan tipe penelitian deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat dalam kurun waktu 2010-2012 ternyata banyak terjadi. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila di kalangan TNI Angkatan Darat adalah 1)Faktor keimanan dan ketaqwaan, 2)Faktor lingkungan sosial, 3)Faktor pergaulan. 4)Faktor Teknologi, 5)Peran Korban. Upaya penggulangan tindak pidana asusila dilakukan dengan 2 cara yaitu tindakan preventif dengan melakukan berbagai penyuluhan hukum. Yang kedua yaitu melalui tindakan represif dengan melakukan tindakan langsung terhadap pelaku tindak pidana asusila.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan segala kerendahan hati penulis haturkan puji syukur kehadiran Allah SWT, dimana berkat limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh Oknum TNI AD (Studi Odmil III-16 Makassar Tahun (2010-2012))"

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan .sebuah kelegaan, karena segala sesuatunya akan dimulai dari sini. Penulis ingin berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan semangat, membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis.

Disisi lain, penulis amat menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini niscaya jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak tentunya akan memperkaya dan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaannya.

Akhirnya, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penuh ikhlas penulis memberikan hatur terima kasih sedalam-dalamnya, yang pertama kepada Tuhan-ku, Allah SWT, sang penguasa tunggal atas langit-bumi dan isinya. Selanjutnya kepada Rasul Allah, Muhammad SAW, pemimpin ummat manusia segala zaman, yang berjuang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang. Kemudian dengan rasa rendah hati dan rasa hormat yang sangat tinggi penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Syamsuddin dan Hadira yang selama ini telah banyak berkorban baik materi maupun energi,dan kepada saudara penulis Jasman, Akbar yang selalu memberikan semangat dan bantuan.Serta keluarga besar penulis yang selalu berdoa yang terbaik buat penulis.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan, juga petunjuk dari Prof.Dr. Aswanto, S.H. M.S., DFM selaku pembimbing I skripsi dan Hijrah Adhyanti M, S.H., M.H selaku pembimbing II skripsi yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, saran, dan kritik yang membangun, menebarkan keceriaan serta optimisme

kepada penulis dan akan selalu penulis ingat. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dengan segala kerendahan hati , ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib penulis berikan kepada Yth:

1. Bapak Prof. Dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO., selaku rector Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof .Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., Dr Amir Ilyas, S.H ., M.H., dan Haeranah S.H., M.H.,yang telah berperan sebagai penguji skripsi ini ditengah kesibukan beliau.
4. Bapak Prof. Dr., Muhammad Yunus, S.H., M.Si. selaku Penasehat Akademik penulis.
5. Bapak Kolonel Basir, Kepala Oditurat Militer III-16 Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktunya dan kerja samanya selama penulis melakukan penelitian.
6. Bapak Komandan Pomdam VII Wirabuana dan Wakil Komandan Pomdam VII Wirabuana, serta seluruh staf Pomdam VII/Wirabuana.
7. Bapak Lettu Cpm Rosichan selaku Pasi Idik Pomdam VII/ Wirabuana dan Bapak Kapten Amir yang telah banyak membantu.
8. Bapak Komandan Denpom VII/6 Mayor Cpm Muhammad Faisal Amin Lubis dan Wadan Denpom VII/6 Mayor Cpm Akbar yang telah membantu dalam melakukan penelitian. Serta seluruh staf Denpom VII/6.
9. Bapak Lettu Cpm Rokhmana selaku Pasi Lidik Pamfik Denpom VII/6 yang telah meluangkan waktunya dalam melakukan penelitian.
10. Para dosen/pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Para staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Bunga.
12. Orang Tua tercinta Syamsuddin dan Hadira, jasamu tidak terhitung Ibu.terima kasih atas kepercayaanmu
13. Saudara-saudaraku yang tersayang.
14. Sahabat penulis Ghina Mangala Hadis Putri yang selalu berbagi baik suka maupun dukanya.
15. Tante Hasmiati dan keluarga yang sudah membantu selama kuliah di kampus Merah.
16. Sahabat SMILE Ghina Mangala Hadis Putri, Yupita Sari Saeful, Ernawati, Andi Sulastri, Mashyita Utrujjah Dwi natsir. Banyak pengalaman yang bisa kita petik dari cerita persahabatan ini.
17. Sahabat SMA Rina Setianingsi
18. Sri Rahayu adik Angkat Penulis, yang selau memberikan dukungannya.
19. Teman-teman Pengurus dan Pengawas PKM KOPMA UNHAS periode tahun 2012-2013, Rina Andriani, Ahmad Syawal, Indo Esa,

Ince, Muhammad Iqra, Rismawati Lasa, Sulastri Wulandari yang selalu kompak di masanya.

20. Teman-teman KKN gel, 82 kecamatan Enrekang Kota. Desa Lembang. Maryam Ahmad, Try, Ammar Jaya Patturusi, Hasanuddin, Iwan Richardo Nainggolan, Gunawan, Marsiansyah.
21. Keluarga besar penulis yang tidak bisa dituliskan namanya satu persatu.
22. Keluarga besar Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2009 tanpa terkecuali.

Serta seluruh pihak yang telah membuat perjalanan hidup penulis selama kuliah menjadi penuh warna dan penuh arti dan banyak menciptakan kisah yang akan penulis jadikan kisah klasik yang tak lekang oleh waktu.

Akhir kata,

“adabanirobbi fa-ahsana ta’dibi”

Hamba diberikan pendidikan (ada) oleh Rabbku, maka Dia menjadikan adab (pendidikan)-ku yang terbaik.

Menjadi hutang bagi penulis kepada Allah SWT menjadi manusia yang baik.

Makassar, November 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kriminologi	6
B. Teori-teori Kriminologi tentang Sebab-sebab Kejahatan ...	12
C. Pengertian Delik	18
D. Pengertian Delik Kesusilaan	26
E. Jenis Delik Kesusilaan menurut KUHP	27
F. Tentara Nasional Indonesia	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	39
B. Jenis dan Sumber Data	39

C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum Tni Angkatan Darat .	41
B. Upaya Penaggulangan Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum Tni Angkatan Darat	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang aman dan tentram, karena itu setiap warga negara berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta negara berkewajiban menjamin bahwa setiap warga bersamaan kedudukannya di muka hukum. Perwujudan kehidupan yang aman dan tentram tercermin dalam penegasan keadilan yang berdasarkan hukum sebagai salah satu upaya terciptanya tujuan nasional. Untuk terciptanya tujuan nasional seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka dibutuhkan antara lain tersedianya sumberdaya manusia yang mandiri dan berkualitas.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai anggota TNI digarda terdepan Indonesia, di mata masyarakat menjadi tauladan. Oleh karena itu, segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI

harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, kitab undang-undang militer ataupun undang-undang hukum pidana umum.

Begitu pentingnya peran TNI di masyarakat, anggota TNI yang terpilih berasal dari warga negara yang telah diseleksi dan diserahkan tugas khusus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. TNI dalam bersikap harus sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, delapan wajib TNI serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keputusan (Skep) Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) Nomor : Skep/B/911/XI/1972 Tanggal 10 November 1972 menerangkan delapan wajib TNI sebagai arahan bagi anggota TNI dalam bersikap. Yaitu anggota TNI harus bersikap ramah tamah, sopan santun rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum. Anggota TNI pun harus senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Dalam tindakannya tidak boleh merugikan rakyat apalagi menyakiti hati masyarakat, serta menjadi pelopor usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Begitu pentingnya peran anggota TNI dalam masyarakat.

Jika seorang anggota TNI melakukan tindakan tidak terpuji apalagi melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Seperti asas *equality before the law* bahwa apapun

kedudukan serta profesi apapun seseorang tetaplah sama kedudukannya di muka hukum. Dengan demikian anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan tetap di proses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak memandang siapapun maka anggota TNI pun tetap harus diadili. Berdasarkan kekuasaan kehakiman maka diadili oleh pengadilan militer. Peradilan militer merupakan sarana pembinaan anggota TNI agar citra TNI tetap baik di mata masyarakat karena walau bagaimana pun militer adalah bagian dari masyarakat atau bangsa Indonesia.

Walaupun anggota TNI dianggap sebagai tauladan bagi masyarakat, karena segala perbuatan dari anggota TNI dinilai oleh masyarakat. Masih terdapat anggota TNI yang melakukan tindak pidana mulai dari desersi, penganiayaan, asusila, pencurian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penyalahgunaan narkoba, penggelapan serta tindak pidana lainnya. Rekapitulasi ini menjadi bukti bahwa anggota TNI pun masih banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji.

Berdasarkan data dari Peradilan Militer Makassar, kasus asusila termasuk dalam empat kasus yang paling sering terjadi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat. Penulis menganggap penting untuk meneliti faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat serta upaya

menanggulangi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar Belakang Masalah tersebut diatas, maka penulis mengemukakan Rumusan Masalah di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana asusila yang dilakukan oknum TNI Angkatan Darat ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat
2. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat

Adapun kegunaan penulisan adalah:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum terutama menyangkut masalah penanganan Tindak Asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum terutama Polisi Militer Angkatan Darat dalam melakukan penanganan Tindak Asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi perancis.

Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan (A.S.Alam dan Amir Ilyas 2010:1).

Pengertian kriminologi (Hari Saherodji, 1980:9) yaitu:

Mengandung pengertian yang sangat luas, dikatakan demikian, karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh dan sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini. Diantaranya adalah:

Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010 : 10), memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bongger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :

1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam,
2. Sosiologi criminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial),
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya,
4. Psipatologi criminal dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri, dan
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman. Di samping itu terdapat kriminologi terapan berupa :
 - a. *Hygiene kriminal*, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - b. *Politik criminal*, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi.
 - c. *Kriminalistik (policie scientific)*, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Bonger, dalam analisisnya terhadap masalah kejahatan, lebih mempergunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisa tentang hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan.

Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010:11) merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang

bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a sosial phenomenon*). Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

3. Penology

Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

Menurut Edwin H. Sutherland (A.S. Alam Amir 2010) kriminologi adalah:

“criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena” (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)

Moeljatno (1986 : 3) mengemukakan bahwa kriminologi adalah “sebagai suatu istilah global atau umum suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian rupa dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja”

Sedangkan menurut Wilhelm Saver (Moeljatno, 1986 :3) bahwa

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga objek penelitian kriminologi ada dua, yaitu :1. Perbuatan individu (Tat Und Tater), 2.Perbuatan kejahatan.

Van bammelen (Moeljatno 1986: 3) mengatakan bahwa :

Kriminologi mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat, maka kriminologi merupakan bagian dari ilmu tentang kehidupan masyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk hidup.

Menurut ahli U.S.A: Thorsten Sellin (Moeljatno, 1986:3), “istilah *criminology* di U.S.A dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulanginya (treatment)”.

Kita melihat pendapat ahli U.S.A lain Sutherland (Moeljatno 1986:4) yang beranggapanbahwa:

Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat (social). Ilmu meliputi:

1. Cara proses pembuatan undang-undang,
2. Pelanggaran terhadap undang-undang dan
3. Reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran ini, hal-hal mana merupakan 3 segi pandangan (aspek) dari suatu rangkaian hubungan timbal balik yang sedikit banyak merupakan suatu kesatuan.

Menurut Moeljatno, (1986:6) menyatakan bahwa “kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu”.

Berdasarkan uraian singkat di atas ditarik suatu pemikiran, bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari karena dengan adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Munculnya lembaga-lembaga kriminologi di beberapa perguruan tinggi sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan-sumbangan dan ide-ide yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan kriminologi sebagai *science for welfare of society*.

Dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Kriminologi merupakan bagian dari kurikulum program studi ilmu hukum Karena berdasarkan *symposium international society of riminology*, kriminologi perlu diajarkan bagi sekolah tinggi hukum atau bagi aparat penegak hukum.

Wolfgang, Savitz dan Jonhston (Topo Santoso dan Eva Achjani ulfa, 2001:12), dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan

pengertian tentang dua puluh gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi :

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- b. Pelaku kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang (selanjutnya UU). Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe–tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual. Dalam hal ini kriminologi merupakan *non legal discipline*.

J. Constant (A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010:2) memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat.

Sutherland (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010:3) menambahkan bahwa dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisiplin. Berbagai disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan banyak lainnya.

B. Teori-teori Kriminologi tentang Sebab-sebab Kejahatan

Sesuai dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab dalam bidang etiologi criminal, di bawah ini berturut-turut akan dibicarakan teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari beberapa aspek yaitu:

1. Teori-teori yang Mencari sebab Kejahatan dari Aspek Fisik (Biologis Kriminal)

Usaha-usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis di pelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pada pendapat

Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. ajaran ahli-ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi dasar:

- 1) Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada didalamnya dan bentuk dari otak,
- 2) Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan, dan
- 3) Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkora kepala.

2. Teori-teori yang Mencari sebab Kejahatan dari Faktor Psikologis dan Psikiatris (Psikologi Kriminal)

Usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor psikis termasuk agak baru. seperti halnya para positivistis pada umumnya, usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.

Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, dan walaupun, ada maka perumusannya sangat luas. Adapun bentuk-bentuk gangguan mental yaitu:

- 1) Psikoses
 - 2) Neoroses
 - 3) Cacat Mental
- ## **3. Teori-teori yang Mencari sebab Kerajahatan dari Faktor Sosiologi Kultural (Sosiologi Kriminal)**

Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Secara umum dapat dikatakan setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum dan hankam serta struktu-struktur yang ada.

Mempelajari tindak penyimpangan sosial (kejahatan), dapat melalui 2 cara pendekatan yaitu:

- 1) Melihat penyimpangan sebagai kenyataan objektif
- 2) Penyimpangan sebagai problematika subjektif

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di Prancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lombroso. Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- 1) Teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan di antara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah teori anomie dan teori-teori sub-budaya delinkuen.

Teori kelas dapat dipandang sebagai “pendewasaan” teori-teori sosiologi kriminal. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri yang terdapat atau yang melekat pada orang atau pelakunya, teori kelas mencari “di luar” pelakunya, khususnya pada struktur sosial yang ada.

- 2) Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya, termasuk dalam teori ini adalah teori-teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi, dan differential association.

Dapat dikatakan teori ini sudah agak kuno dibanding dengan teori-teori kelas. Adapun teori-teori yang termasuk teori tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu:

a) Teori ekologis

Teori-teori ini mencoba dan mencari sebab-sebab tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial yaitu:

1. Kepadatan penduduk
2. Mobilitas penduduk
3. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
4. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh

b) Teori konflik kebudayaan

Teori ini diajukan oleh T. Sellin dalam sosial, kepentingan dan norma-norma. Konflik antara norma-norma dari aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain:

1. Bertemunya dua budaya besar
 2. Budaya besar menguasai budaya kecil
 3. Apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain.
- c. Teori-teori faktor ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut, merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Mengenai hubungan antara faktor ekonomi dan kejahatan agaknya perlu diperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Teknik studi
 2. Batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran
- d. Teori differential association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Menurut Sutherland perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan

Menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, Sutherland mengajukan 9 proposisi sebagai berikut:

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negative berarti perilaku kejahatan tidak diwarisi.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan bahasa isyarat.
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negative komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relative, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.

4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang harus dipelajari tersebut meliputi: teknik melakukan kejahatan, motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenaran dan sikap.
5. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan (definisi) aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
6. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat dari pada tidak jahat.
7. Differential association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya. Hubungan dengan ini, maka differential association bisa dimulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup.
8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
9. Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari nilai yang sama. Pencuri umumnya mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang akan tetapi pekerja yang jujur, dia bekerja juga dengan tujuan untuk memperoleh uang.

Dalam mengajukan teorinya tersebut, Sutherland ingin menjadikan teorinya tersebut sebagai teori yang dapat menjelaskan semua sebab-sebab kejahatan.

C. Pengertian Delik

Kata “Delik” berasal Dari bahasa latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict/staarbaarfeit*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana, sedangkan dalam kitab undang-undang hukum pidana yang dalam tulisan ini disingkat KUHP *starbaarfeit*, istilah tersebut yang beberapa sarjana hukum terjemahkan dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, tinda pidana dan delik.

Moeljanto (Ledeng Marpaung 2005 : 7) memakai istilah perbuatan pidana untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada perbuatan. Kata “tindak” menunjukkan pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya mengatakan keadaan yang konkret. Selanjutnya beliau merumuskan arti perbuatan pidana sebagai berikut :

Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja perlu diingat laranggannya ditunjukkan pada perbuatannya, (yaitu suatu keadaan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Pembuatan undang-undang akhir-akhir ini memakai istilah tindak pidana. Dan sebagian besar Pasal-Pasal dalam KUHP berasal dari

bahasa Belanda, karena belum diterjemahkan oleh pembuat undang-undang.

Utrecht (Leden Marpaung 2005 : 7) memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang tinjau adalah peristiwa (*feit*) dari hukum pidana.

Rusli Effendy (1986 : 55) juga memilih istilah peristiwa pidana dengan rumusan sebagai berikut :

Suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana atau hukum pidana, beliau menjelaskan sebabnya memakai istilah hukum pidana karena ada hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana tidak tertulis.

Berdasarkan pendapat tersebut tidak sesuai dengan bahasa Indonesia karena kedua kata tindak adalah kata benda sedangkan yang lazim kata benda disusul dengan kata sifat istilah yang tepat adalah perbuatan criminal istilah lain yang tepat adalah delik yang pengertiannya yang sama dengan criminal.

Dalam definisi ahli hukum pidana ini mengandung unsur-unsur pertanggung jawaban pembuat adalah :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab;
- 2) Kesalahan (*lodus atau culpa lata*);
- 3) Tidak adanya dasar pemaaf.

Jadi baik istilah tindak pidana maupun peristiwa pidana menunjukkan satu perbuatan yang bertentangan KUHP.

Mengenal “delik” dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi sebagai berikut :

Vos delik adalah *fiet* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.

Van Hamel delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Simons (Leden Marpaung 2005 : 8) delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Moeljatno, (Rusli Effendy, 1980: 47) merumuskan delik adalah “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Menurut Andi Hamzah (1994 : 72) memberikan definisi mengenai delik yakni:

“Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”

Menurut S.R Sianturi (Amir Ilyas 2002 : 21) menggunakan delik sebagai tindakan pidana jelasnya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut:

Tindakan pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam

dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).

Sianturi (Amir Ilyas 2002 : 22-23) berpendapat bahwa Istilah tindak adalah merupakan singkatan dari tindakan artinya pada setiap orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan dalam pekerjaan dan golongan kelamin.

Menurut Amir Ilyas (2012 : 28) sebagai Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur: perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik), memiliki sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.

Dari beberapa rumusan tentang delik yang dikemukakan oleh beberapa sarjana di atas dapat disimpulkan bahwa delik adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang karena merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil,. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, disini rumusan dari perbuatan jelas. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian sedangkan delik materiil adalah delik

yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan. Misalnya Pasal 281 KUHP tentang Tindak Pidana dengan Sengaja merusak Kesusilaan di Depan Umum,

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas subjektif dan objektif Leden Marpaung (2005 :9-10).

Suatu peristiwa hukum dapat dikatakan delik adalah suatu peristiwa yang didalamnya memenuhi unsur-unsur pidana Leden Marpaung yakni:

1. Unsur Subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam pelaku.

Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”.

Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan akan pasti (*opzet ais zekerheidsbewustzijn*);
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :

- 1) Tak berhati-hati
 - 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.
2. Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :
- a. Perbuatan manusia
 - b. Akibat (*result*) perbuatan manusia
 - c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)
 - d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan
- b. Suatu akibat
- c. Keadaan (*omnstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Kesalahan.

Menurut Lamintang (1984 : 184), unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adlah sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan.
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan lebih dahulu, seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalamkejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
3. Kualitas, yakni hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Delik sebagai mana yang telah dikemukakan sebelumnya mempunyai unsur-unsur secara umum, menurut Sianturi yang berpandangan monistis unsur-unsur delik pada umumnya :

- Kesalahan;
- Subjek;
- Bersifat melawan hukum;

- Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- Waktu, tempat dan keadaan.

Unsur-unsur delik pada umumnya jika dikaitkan dengan pengertian delik, maka dapat dirumuskan bahwa tindak pidana sebagai tindak pidana suatu tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seorang (yang mampu bertanggung jawab).

Selanjutnya Moeljanto (1986 : 211) mengemukakan unsur-unsur delik pada umumnya, sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif, dan
- e. Unsur-unsur melawan hukum yang subjektif.

Akhirnya ditekankan bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan tersendiri ada elemen-elemen lain namun ada kaitannya perumusan juga diperlukan elemen batin dikaitkan dengan melawan hukum yang subjektif, seperti delik penipuan Pasal 378 KUHP.

D. Pengertian Delik Kesusilaan

Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan Balai Pustaka 1989. Laden Marpaung (2008 : 2) Kata “susila” dimuat arti sebagai berikut :

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
3. Pengetahuan tentang adat.

Dengan demikian makna dari “kesusilaan” adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, maka dapatlah disimpulkan bahwa pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan jenis tindakan pidana kesusilaan, penggolongan tindak pidana kesusilaan tersebut yakni:

1. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan, yakni Pasal 281 s.d. 303 Bab 14 Buku ke 2 KUHP.
2. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran, yakni Pasal 532 s.d. 547 Bab 6 Buku 3 KUHP.

E. Jenis Delik Kesusilaan menurut KUHP

Jenis-jenis kejahatan kesopanan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual (disebut kejahatan seksual), terdiri dari :

- a. Pasal 281 KUHP Tindak Pidana dengan Sengaja Merusak Kesusilaan di Depan Umum
- b. Pasal (282) KUHP Tindak Pidana Menyebarkan, Mempertunjukkan, dan lain-lain Suatu Tulisan, Gambar atau Benda yang Menyinggung Kesusilaan
- c. Pasal (283) KUHP Tindak Pidana Menawarkan, Menyerahkan, dan lain-lain Suatu Tulisan, Gambar, dan lain-lain yang Sifatnya Melanggar Kesusilaan kepada Anak di Bawah Umur
- d. Pasal (283 bis) KUHP Pencabutan Hak untuk Melakukan Pekerjaan bagi Pelaku Tindak Pidana yang Diatur Dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP dalam Pekerjaannya
- e. Pasal (284) KUHP Tindak Pidana Perzinaan
- f. Pasal (285) KUHP Tindak Pidana Pemerkosaan
- g. pasal (286) KUHP Tindak Pidana Mengadakan Hubungan Kelamin dengan Wanita yang Sedang Berada dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya
- h. Pasal (287) KUHP Mengadakan Hubungan Kelamin di Luar Pernikahan dengan Seorang Wanita yang Belum Mencapai Usia Lima Belas Tahun atau yang Belum Dapat Dinikahi

- i. Pasal (288) KUHP Tindak Pidana Mengadakan Hubungan Kelamin dalam Pernikahan dengan Seorang Wanita yang Belum Dapat Dinikahi
- j. Pasal (289) KUHP Tindak Pidana dengan Kekerasan atau dengan Ancaman Akan Memakai Kekerasan Memaksa Seseorang untuk Melakukan atau untuk Membiarkan Dilakukannya Tindakan-Tindakan Melanggar Kesusilaan
- k. Pasal (290) KUHP Tindak Pidana Melakukan Tindakan Melanggar Kesusilaan dengan Orang yang Berada dalam Keadaan Pingsan, dalam Keadaan Tidak Berdaya atau Belum Mencapai Usia Lima Belas Tahun
- l. Kejahatan-kejahatan: bersetubuh dengan perempuan di luar yang dalam keadaan pingsan Pasal (286) KUHP, bersetubuh dengan perempuan yang umurnya belum 15 tahun Pasal (287) KUHP, perkosaan berbuat cabul Pasal (289) KUHP dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun Pasal (290) KUHP, dan dalam keadaan yang memberatkan, yakni apabila menimbulkan akibat-akibat luka bagi korban Pasal (291 (1)) KUHP;
- m. Kejahatan perkosaan bersetubuh Pasal (285) KUHP, bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan Pasal (286) KUHP bersetubuh dengan perempuan yang umurnya belum 15 tahun Pasal (287) KUHP,

perkosaan berbuat cabul Pasal (289) KUHP, dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun dalam keadaan yang memberatkan, yakni apabila menimbulkan akibat kematian korban Pasal (29(2)) KUHP;

- n. Pasal (293) KUHP Tindak Pidana dengan Sengaja Menggerakkan Anak di Bawah Umur untuk Melakukan Tindakan Melanggar Kesusilaan dengan Dirinya atau Membiarkan Dilakukannya Tindakan Seperti Itu dengan Dirinya
- o. Pasal (294) KUHP Tindak Pidana Melakukan Tindakan Melanggar Kesusilaan dengan Anaknya Sendiri, dengan Anak tirinya, dengan Anak Angkatnya, dan lain-lain yang Masih di Bawah Umur
- p. Pasal (295) KUHP Tindak Pidana dengan Sengaja Menyebabkan atau Memudahkan Dilakukannya Tindakan Melanggar Kesusilaan dengan Orang Ketiga oleh Anaknya Sendiri, Anak Tirinya, Anak Angkatnya, atau Anak yang Diurusnya yang Belum Dewasa
- q. Pasal (296) KUHP Tindak Pidana Membuat Kesengajaan Menyebabkan atau Memudahkan Dilakukannya Tindakan-Tindakan Melanggar Kesusilaan dengan Orang Ketiga sebagai Mata Pencaharian atau Sebagai Kebahagiaan

- r. Pasal (297) KUHP Perdagangan Wanita dan Pria yang Belum Dewasa
- s. Pasal (299) KUHP Tindak Pidana dengan Sengaja Merawat Wanita atau Menggerakkan Seorang Wanita Mendapatkan Perawatan dengan Memberitahukan kepadanya atau dengan Memberikan Harapan kepadanya bahwa suatu Kehamilan Dapat Menjadi Terganggu

Pelanggaran kesusilaan yang objek pelanggarannya berupa kepentingan hukum yang dilindungi, yakni rasa kesopanan masyarakat di bidang seksual yang terdiri dari :

- a. Pelanggaran dengan menyanyikan lagu atau pidato di muka umum yang melanggar kesusilaan atau di muka umum mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan Pasal (532) KUHP;
- b. Pelanggaran pornografi Pasal (533) KUHP;
- c. Pelanggaran dengan mempertunjukkan dan lain sebagainya sarana pencegahan kehamilan Pasal (534) KUHP;
- d. Pelanggaran dengan mempertunjukkan dan lain sebagainya sarana untuk menggugurkan kandungan Pasal (535) KUHP.

F. Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia adalah prajurit yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer, pengertian Tentara secara formil terdapat dalam beberapa pasal seperti Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 49.

Pasal 46 ayat (1) yang dimaksud dengan tentara ialah :

Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99 dan Pasal 139 KUHPM.

Pasal 46 ayat (2) : kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.

Pasal 47 : barang siapa yang kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila

dapat diyakinkan bahwa dia telah termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas.

Pasal 49 ayat (1) termasuk pula sebagai anggota Angkatan Perang:

- i. Para bekas tentara yang dipekerjakan untuk suatu dinas ketentaraan.
- ii. Komisaris-komisaris yang berkewajiban ketentaraan yang berpakaian tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu melakukan jabatan demikian itu
- iii. Para perwira pensiun, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.
- iv. Mereka yang memakai pangkat militer tituler baik oleh atau berdasarkan Undang-undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan peraturan Dewan Pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajibannya, berdasarkan mana mereka memperoleh pangkat militer tituler tersebut.
- v. Mereka, anggota-anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan kedudukannya dengan angkatan darat, laut, dan udara atau selanjutnya.

Pasal 49 ayat (2) :

Anggota Tentara yang dimaksud dalam ayat (1) dianggap memakai pangkat yang jabatannya paling akhir atau paling tinggi yang

diberikan kepadanya pada waktu atau sesudahnya mereka meninggalkan dinas tentara

Pasal 49 ayat (3) : Pasal 46 ayat (2) berlaku untuk ini.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk menyebut prajurit Tentara Nasional Indonesia digunakan istilah Militer. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, adapun jati diri Tentara Nasional Indonesia Adalah sebagai berikut :

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Tugas pokok TNI adalah sebagai berikut :

- a. Operasi militer untuk perang.
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk
 - 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
 - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata.
 - 3) Mengatasi aksi terorisme.
 - 4) Mengamankan wilayah perbatasan.
 - 5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
 - 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
 - 7) Mengamankan Presiden dan wakil Presiden beserta keluarganya.
 - 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
 - 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah.
 - 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

- 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
- 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
- 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue).
- 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Tugas pokok TNI harus ditunjang oleh prajurit yang berkualitas. Prajurit yang dimaksud yakni prajurit yang bermoral serta tunduk pada hukum dalam TNI, prajurit dikelompokkan dalam golongan kepangkatan yaitu perwira, bintara, tantama. Setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan.

TNI sebagai Tentara Nasional merupakan tentara kebangsaan, bukan tentara kedaerahan, suku, ras, atau golongan agama. TNI mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa di atas semua kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.

Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara di bidang pertahanan yang berfungsi sebagai penangkal bentuk ancaman militer dan bersenjata, penindak bentuk ancaman dan pemulih kondisi keamanan.

Untuk memagari dan memberikan rambu bagi 'penampilan' dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan jati diri prajurit sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang dan Tentara Nasional oleh TNI-AD telah diberikan pedoman kehidupan, perilaku dan tindakan melalui apa yang disebut Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Dengan demikian, prajurit TNI yang telah mengamalkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dengan benar niscaya telah menunjukkan identitas prajurit yang benar pula.

Identitas atau jati diri TNI (AD) apabila dihayati dengan benar oleh Prajurit TNI akan memberikan dorongan dan semangat untuk dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dan secara kesatuan akan dapat melaksanakan tugas pokok TNI-AD di dalam pelaksanaan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Dengan demikian menjadi kewajiban TNI-AD untuk terus-menerus mensosialisasikan jati diri TNI tersebut dan menjabarkan nilai-nilai yang terkandung pada jati diri tersebut guna menyemangati jiwa prajurit TNI-AD dalam menunaikan tugas yang dibebankan kepadanya.

Pembinaan kemandirian TNI-AD dengan rakyat TNI adalah Tentara Rakyat, demikian juga TNI-AD yang menjadi salah satu komponen TNI adalah Tentara Rakyat. Untuk itu TNI-AD harus selalu berada bersama rakyat, memperhatikan dan melindungi rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat dalam upaya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Bahwa suatu keharusan TNI-AD selalu berada di tengah-tengah rakyat dan tidak memisahkan diri dari rakyat. Hal ini harus selalu diupayakan pembinaannya melalui program-program yang menjadikan TNI-AD tidak terpisah dari rakyat, Program ini harus berkesinambungan sepanjang tahun, diharapkan program yang dilaksanakan bersama rakyat adalah untuk kepentingan rakyat. Segala upaya oleh pihak tertentu yang tujuannya akan memisahkan TNI-AD dengan Rakyat harus ditentang dan digagalkan upayanya karena apabila TNI-AD jauh dari Rakyat maka TNI-AD sudah kehilangan jati dirinya dan kehilangan kekuatan pendukung yang sangat besar dalam penugasan TNI-AD

Pelaksanaan program Kemanunggalan TNI dengan rakyat yang sudah dan selalu dilakukan setiap tahun, selama ini dinilai sukses. Namun sayangnya setelah terlaksananya program tersebut tidak ada kelanjutan untuk memelihara hasil program tersebut, sehingga seolah-olah terjadi kemandegan untuk program sesaat.

Hal ini yang perlu menjadi perhatian agar tercapai suatu kondisi TNI-AD menjadi Tentara Rakyat, bekerja sama dengan Rakyat memiliki rasa satu dalam mempertahankan dan menegakkan NKRI.

Bagi para prajurit kegiatan manunggal dengan rakyat sudah dimulai sejak awal menjadi prajurit bahkan di tingkat mula Taruna Akademi Militer sudah diberi penghayatan rute gerilya Panglima Besar, dimana kegiatan ini dapat memberi gambaran bagaimana tentara

bersama rakyat bekerjasama untuk melawan penjajah Belanda, tanpa mengenal menyerah demi mempertahankan NKRI.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai sistem tulisan ilmiah yang proporsional.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kota Makassar yaitu tepatnya pada Oditurat Militer III-16 Makassar, Datasemen Polisi Militer Makassar, dan Polisi Militer Kodam VII Wirabuana (POMDAM). Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut, karena objek dan data yang dibutuhkan penulis untuk dapat menjawab pembahasan ini.

B. Jenis dan Sumer Data

Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, digolongkan ke dalam 2 jenis data, yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode

wawancara kepada para pelaku tindak pidana asusila, serta lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis melalui penelusuran literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan pokok materi pembahasan.

C. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer Teknik pengumpulannya adalah melalui wawancara dengan pihak-pihak yang lebih mengetahui tentang hal ini seperti Oknum TNI, Pihak pengadilan Militer dan pihak Oditurat Militer III-16 Makassar.
- b. Data Sekunder Teknik pengumpulannya adalah penelusuran terhadap dokumen-dokumen, arsip-arsip, serta buku-buku ilmiah yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan daerah di setiap Provinsi di Indonesia terutama daerah perkotaan dan sekitarnya, berdampak bukan hanya peningkatan arus urbanisasi semata-mata tetapi juga berdampak pada perubahan struktur masyarakat. Perubahan dimaksud adalah perubahan dari struktur masyarakat desa ke arah struktur masyarakat kota yang ditandai dengan perubahan pandangan hidup tradisional menjadi modern. Perubahan pandangan dimaksud dengan adanya perubahan pola pikir menjadi lebih rasional. Perubahan dari pola kehidupan yang bergantung pada alam menjadi pola kehidupan yang ikut menentukan dan mengatur alam. Perubahan tersebut belum diikuti dengan perubahan mekanisme kerja aparat Polisi terhadap penanggulangan kejahatan.

Menurut Lettu Rokhmana, keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat ini akibat dari pengaruh lokasi. Dan oknum ini juga berdomisili diluar satuan sehingga pengaruh lokasi menjadi faktor keterlibatan oknum TNI angkatan Darat melakukan Tindak Pidana Asusila. Dan pada tahun 2010-2012, masih ditemukan kasus Asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat ini. Faktor lokasi merupakan salah satu penyebab terjadinya Tindak Asusila tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Oditurat Militer Tinggi III Oditurat Militer III -16 Makassar mengenai kasus Tindak Pidana

Asusila yang di lakukan oleh Oknum TNI angkatan Darat tahun 2010-2012.

Tabel 1.

**Data Kasus Kejahatan Asusila Di Oditurat Militer III-16 Makassar
Tahun 2010-2012**

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Asusila
1	2010	22
2	2011	22
3	2012	28
Total		72

Sumber : Oditurat Militer III-16 Makassar (03 Januari 2013)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tindak pidana Asusila yang dilakukan oknum TNI Angkatan Darat di Kalangan Militer dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sebanyak 72 kasus. Jika dilihat dari jumlah kajahatan terhadap asusila dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuakan pada Oditurat Militer Tinggi III Oditurat Militer III-16 Makassar mengenai kasus Tindak Pidaba Asusila yang di lakukan oleh Oknum TNI angkatan Darat tahun 2010-2012. Penulis mengkualifikasikan Tindak pidana Asusila yang di lakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat.

Tabel 2

Kualifikasi Tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh oknum**TNI Angkatan Darat tahun 2010 - 2012**

No.	Tindak Pidana Asusila	Tahun			Jumlah
		2010	2011	2012	
1.	Pasal 281 KUHP	15	12	17	44
2.	Pasal 282 KHUP	0	0	0	0
3.	Pasal 283 KHUP	0	0	0	0
4.	Pasal 283 bis KHUP	0	0	0	0
5.	Pasal 284 KHUP	7	8	8	23
6.	Pasal 285 KHUP	0	2	3	5
7.	Pasal 286 KHUP	0	0	0	0
8.	Pasal 287 KHUP	0	0	0	0
9.	Pasal 288 KHUP	0	0	0	0
10.	Pasal 289 KHUP	0	0	0	0
11.	Pasal 290 KHUP	0	0	0	0
12.	Pasal 292 KHUP	0	0	0	0
13.	Pasal 293 KHUP	0	0	0	0
14.	Pasal 294 KHUP	0	0	0	0
15.	Pasal 295 KHUP	0	0	0	0
16.	Pasal 296 KHUP	0	0	0	0
17.	Pasal 297 KHUP	0	0	0	0

18.	Pasal 299 KHUP	0	0	0	0
Total		72			

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat pada tahun 2010 pelanggaran yang dilakakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat yakni Pasal 281 KUHP Tindak Pidana dengan Sengaja Merusak Kesusilaan di Depan Umum sebanyak 15 Kasus, Pasal 284 KUHP Tindak Pidana Perzinaan sebanyak 7 kasus. Kemudian pada tahun 2011 terjadi peningkatan Tindak Pidana Asusila terhadap Pasal 281 KUHP tentang dengan Sengaja Merusak Kesusilaan di Depan Umum sebanyak 12 kasus dan Pasal 284 KUHP mengenai Perzinaan sebanyak 8 kasus serta Pasal 285 KUHP mengenai Pemerkosaan sebanyak 2 kasus. Pada tahun 2012 kembali terjadi peningkatan Tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat terhadap pasal 281 KUHP Sengaja Merusak Kesusilaan di Depan Umum sebanyak 17 kasus dan Pasal 284 KUHP mengenai Perzinaan sebanyak 8 kasus serta Pasal 285 KUHP mengenai Pemerkosaan sebanyak 3 kasus.

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat

Setelah penulis memaparkan data mengenai perkembangan tingkat Tindak Pidana asusila dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang penulis peroleh dari instansi terkait yakni, Oditurat Militer, Pengadilan

Militer, Denpom (Detasemen Polisi Militer), maka sampailah penulis pada faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat di Kalangan Militer.

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat di Kalangan Militer, maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala Oditurat Militer III-16 Makassar, yaitu Kolonel Chk M. Basir, S.H., (wawancara Tanggal 23/08/2013), mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat di Kalangan Militer dari hasil wawancara tersebut, terungkap bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yaitu :

1. Keimanan

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhannya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan.

Jika seseorang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka mudah sekali seseorang itu melakukan keburukan.

Masalah keimanan dan ketaqwaan merupakan aspek esensial yang berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan tindakan Anggota TNI Angkatan Darat dalam kehidupan sehari-hari. Anggota TNI Angkatan

Darat yang mempunyai dasar keimanan dan ketaqwaan yang kuat yang ditandai dengan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya mempunyai kecenderungan lebih taat terhadap aturan yang berlaku.

2. Lingkungan sosial

Kejahatan asusila adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya didalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan

Dari hasil wawancara penulis, bahwa bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila dimana lingkungan tempat tinggal Anggota TNI Angkatan Darat tersebut kumpulan orang-orang yang penjudi, pemabuk sehingga memancing juga Anggota TNI Angkatan Darat tersebut melakukan perbuatan asusila seperti perzinaan.

3. Pergaulan

Selain faktor lingkungan sosial mendukung terjadinya tindakan asusila, pergaulan pun juga mendukung tindak asusila yang dimaksud. Dimana seorang anggota TNI Angkatan Darat memiliki teman yang

mempunyai akses yang memudahkan dia untuk mengakses video, sehingga menyebabkan anggota TNI Angkatan Darat ini tidak bisa menahan tindakannya karena ada rasa ingin tahu dari dalam setelah melihat video tersebut. dimana dia memiliki pacar yang cantik kesehariannya berpakaian yang dapat mengundang pria meakuakan tindakan asusila.

penulis melakukan wawancara dengan Denpom (Detasemen Polisi Militer), yaitu Lettu Cpm Dadang, S.H., (wawancara Tanggal 23/09/2013), menambahkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila dikalang militer selain dari pada faktor keimanan, lingkungan sosial dan pergaulan. Faktor teknologi juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana.

4. Teknologi

Adanya berkembangnya teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun Informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, prilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada

5. Peran Korban

Peran korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan asusila. Sebagaimana dikemukakan oleh Von Henting (Ninik Widiyanti dan Julius Waskita, 1987:133) bahwa “ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi jahat”

Pada hasil wawancara wahyudi (pelaku tindak pidana Asusila) bahwa si korban jarang sekali jalan bersama tetapi pada saat jalan bersama si korban selalu memakai pakaian yang mengundang hawa nafsunya, sehingga muncul keinginan si pelaku untuk melakukan perbuatan asusila. jadi pada dasarnya dapat dikatakan bahwa korban adalah pihak yang dapat membuat orang menjadi penjahat dan melakukan kejahatan.

Berdasarkan uraian fakta-fakta diatas maka teori dari sutherlind yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila (pencabulan) masih relevan.

Walaupun dari uraian fakta di atas dapat terlihat ada faktor penghambat terungkapnya tindak pidana asusila, dimana dalam masyarakat masih dianggap aib.

Maka dapat ditarik kesimpulan dari uraian fakta-fakta di atas bahwa faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor teknologi, dan peranan korban. Merupakan faktor-faktor penyebab yang penting dari penyebab

tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat dikalangan Militer.

Dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab dalam bidang etiologi kriminal dimana faktor-faktor penyebab tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat dikalangan militer

sesuai dengan teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori ekologi dimana teori ini dipengaruhi faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila. Contohnya: seorang Anggota TNI Angkatan Darat yang tinggal diluar satuan, kemudian lingkungan penjudi, pemabuk. Yang cara otomatis memberikan tekanan sehingga mengakibatkan Anggota TNI Angkatan Darat tersebut melakukan tindak pidana asusila seperti perzinahan

Teori konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Tindak pidana asusila dikalangan militer ini ditengarai dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban. Perpindahan norma-norma perilaku daerah budaya barat dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultur, seperti teknologi yang makin canggih merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultur menentukan struktur tersebut.

Teori differential association berlandaskan pada proses belajar, adalah perilaku kejahatan yaitu perilaku yang dipelajari. Dimana

Sutherland berpendapat bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan. Misalnya film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi yang masih menjadi konsumsi umum, sehingga menimbulkan pengaruh negative pada masyarakat termasuk anggota TNI Angkatan Darat.

B. Uapya penanggulanga tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat

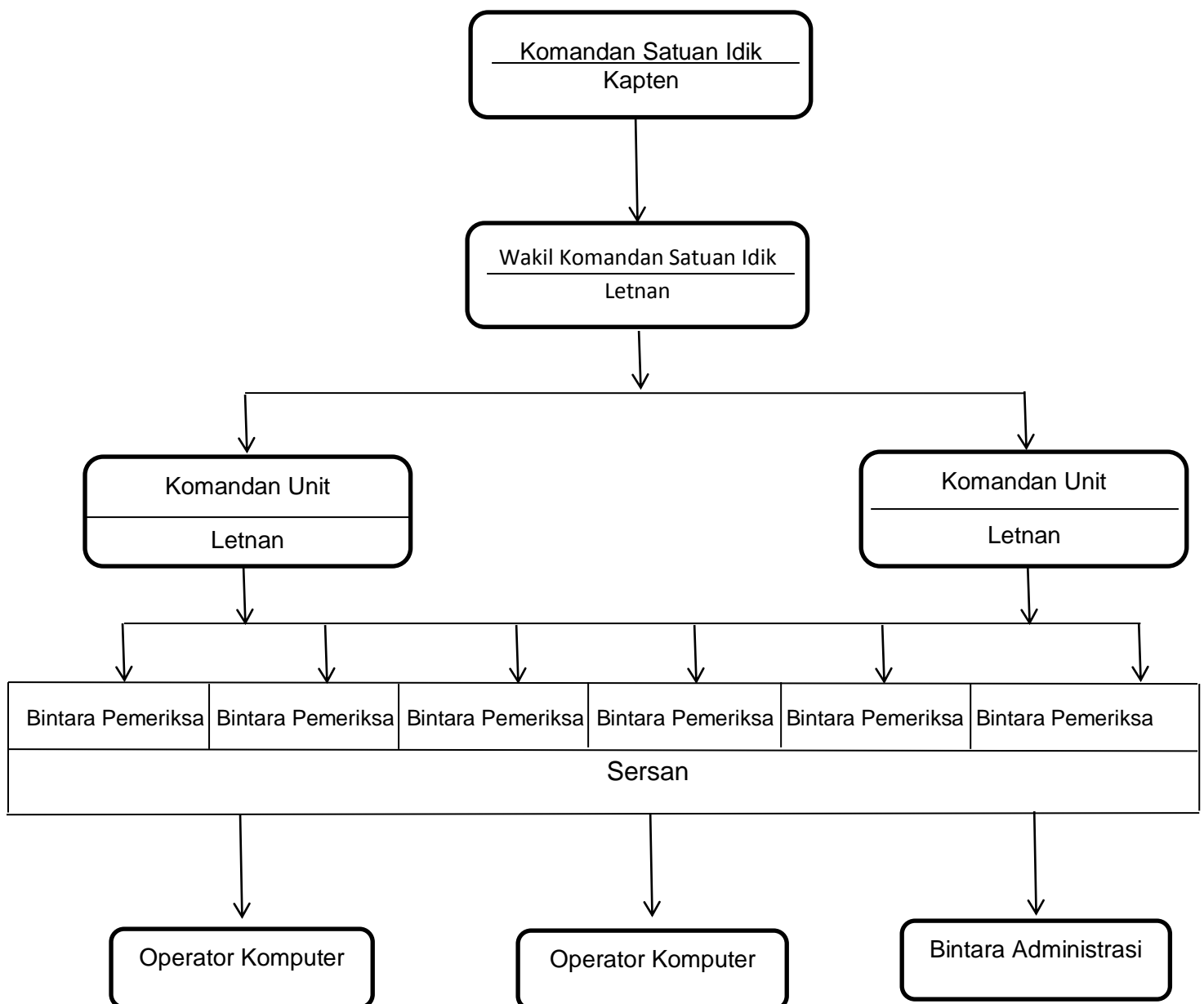
Peranan Polisi Militer Angkatan Darat dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan militer Angkatan Darat yaitu sebagai penyidik perkara dan pencegahan tindak pidana.

Polisi Militer sebagai Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana memiliki wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana,
- b. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian,
- c. mencari keterangan dan barang bukti,
- d. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya,
- e. melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi,
- h. meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- j. melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka, dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum Kegiatan penyidikan pada umumnya ditunjukan

terhadap perkara yang jelas tersangka dan penderitanya, tetapi kegiatan tersebut juga dapat dilakukan terhadap perkara yang masih kurang jelas yang perlu dibuktikan lebih lanjut dengan cara pengamatan dan penjejakan.

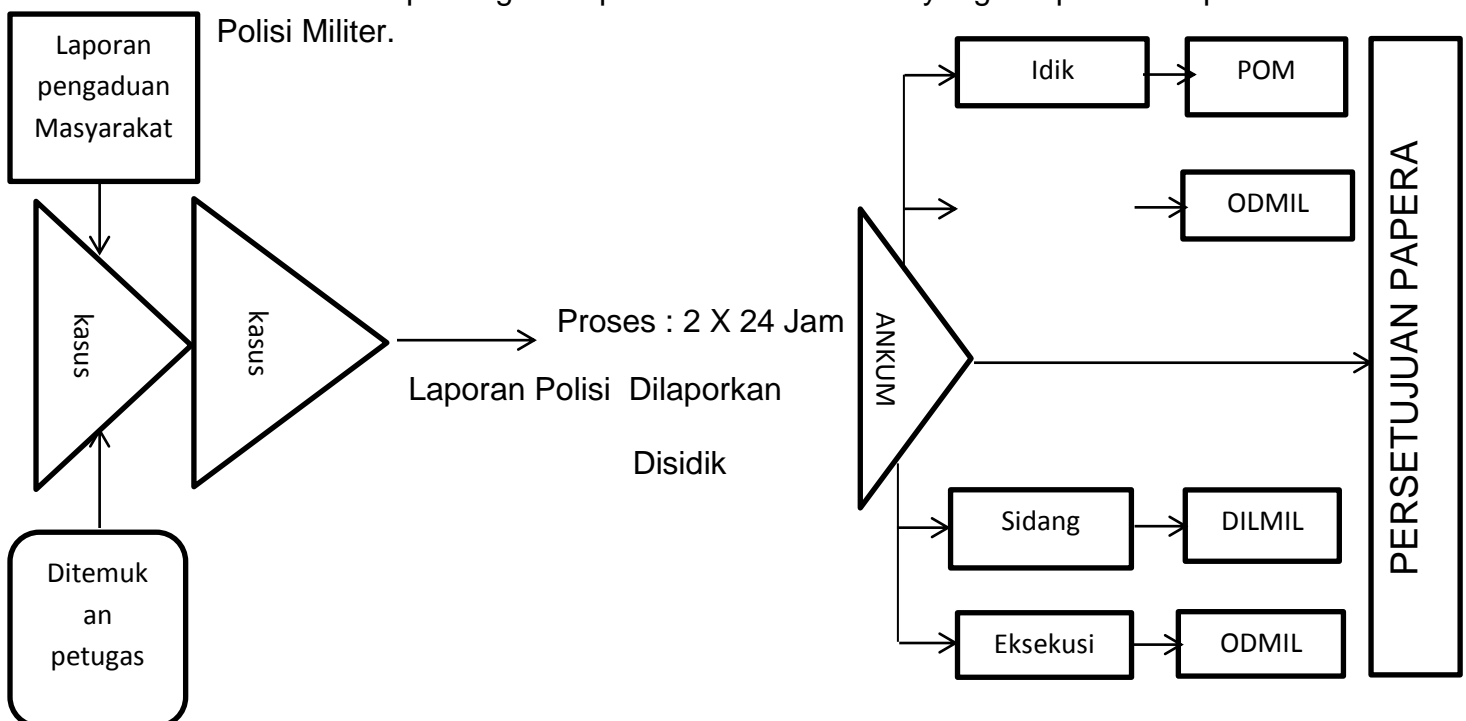
Penyidik Polisi Militer ini terdiri dari 11 orang yakni :



Skema tersebut merupakan struktur dari personil penyidikan perkara pidana Polisi Militer beserta pangkatnya. Komandan bagian penyidikan berpangkat kapten, wakil komandan berpangkat letnan, komandan unit berpangkat letnan, yang memeriksa perkara pidana berpangkat sersan, operator komputer merupakan Pegawai Negeri Sipil golongan 2 A, dan Bintara Administrasi berpangkat sersan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lettu Cpm Rohmana, kasus narkoba merupakan bagian dari tujuh pelanggaran berat TNI yang sudah pasti mendapat hukuman tambahan berupa pemecatan tidak secara hormat. Selama ini kasus narkoba yang dilaporkan maupun tertangkap tangan oleh Polisi Militer saat melakukan razia yakni sebagai pengonsumsi. Kolonel Chk M. Basir mengatakan bahwa Perbuatan Asusila yang dilakukan oleh oknum TNI merusak moral bangsa apalagi karena seorang TNI yang harus menjadi panutan masyarakat harus bersih dari perbuatan pidana. Maka penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan yang dilakukan untuk anggota TNI bukan hanya Angkatan Darat, baik Angkatan Laut maupun Angkatan Udara juga memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan tidak dengan hormat.

Diharapkan dengan penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan mampu mengurungkan niat oknum anggota TNI Angkatan Darat untuk melakukan perbuatan asusila. Memberikan efek jera terhadap anggota TNI Angkatan Darat dan menjadi pelajaran untuk anggota TNI Angkatan Darat lainnya.

Proses penanganan perkara temuan atau yang dilaporkan kepada Polisi Militer.



Sumber data : Detasemen Polisi Militer VII/6 dan Polisi Militer Kodam VII/Wirabuana.

Dari skema tersebut yaitu adanya tindak pidana yang di laporkan maupun ditemukan petugas, harus di kembalikan kepada Atasan yang berhak menghukum atau Komandan Satuan yang selanjutnya Ankom membuat surat penahanan sementara kepada anggotanya yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi prosedurnya sama, yang membedakannya adalah dalam hal pemeriksaan, seorang tidak perlu di dampingi oleh penasihat hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lettu Cpm Rosichan mengemukakan bahwa Adanya laporan pengaduan dari masyarakat maupun ditemukan petugas baik dari pihak Kepolisian maupun Polisi Militer merupakan bahan dasar dilakukannya penyidikan. Kepolisian yang menemukan oknum prajurit TNI Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana, maka harus mengkoordinasi Polisi Militer yang selanjutnya menyerahkan kepada Atasan yang berhak menghukum untuk dibuatkan surat perintah penahanan sementara. Selanjutnya berkas perkara dilimpahkan ke Oditur Militer. Sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Oditur, tersangka di tahan di sel tahanan Polisi Militer dan setelah berkas perkara dilimpahkan ke Oditur Militer, maka tersangka di tahan di sel tahanan satuan sampai adanya sidang penjatuhan hukuman. Apabila penjatuhan hukuman tanpa adanya pemecatan maka tersangka atau terdakwa di tahan di RTM (Rumah Tahanan Militer) atau Masmil (Masyarakat Militer) tetapi apabila penjatuhan hukuman dengan adanya pemecatan maka tersangka atau terdakwa di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Sipil.

Polisi militer juga memiliki peranan sebagai pencegahan tindak pidana yaitu melakukan operasi aktif atau razia. Operasi aktif atau razia rutin dilaksanakan. Terkadang operasi aktif atau razia digelar secara mendadak sehingga penyampaian tentang razia tidak dapat diketahui sehingga Polisi Militer lebih banyak menemukan tindak pidana dibandingkan operasi aktif atau razia yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Polisi militer selalu melakukan observasi atau pemantauan sebagai dasar melaksanakan operasi aktif atau razia. Observasi dilakukan dengan

bekerjasama dengan kepolisian satuan reserse kriminal. Apabila kepolisian menemukan oknum TNI Angkatan Darat melakukan Tindak Pidana maka kepolisian wajib menginformasikan kepada Polisi Militer yang memiliki wewenang menyidik perkara pidana di kalangan militer.

Berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara dengan para aparat penegak hukum militer di lokasi penelitian sebagai informan, maka upaya penanggulangan tindak pidana asusila baik secara jalur non hukum atau tindakan preventif maupun jalur hukum atau tindakan represif

1. Pada lokasi penelitian di Oditurat Militer III-16 Makassar melalui teknik wawancara dengan Kepala Oditurat Militer III-16 M. Basir, S.H. (wawancara tanggal 8/03/2013) mengatakan bahwa upaya penanggulangannya sebagai berikut :

Dalam Oditurat Militer III-16 pertama-tama tindakan yang dilakukan adalah penyuluhan hukum secara terpadu yang bekerjasama dengan KODAM bagian Kumdam (Hukum Kodam). Sikap atasan harus tegas dan bijaksana, sehingga dapat memberikan rasa aman dalam keluarga satuan kemudian Menciptakan keharmonisan dalam keluarga satuan dan lingkungan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pertentangan yang berujung pada tindakan asusila. Anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana, maka anggota tersebut mendapat Sangsi tegas dengan pemecatan atau pencopotan pangkat. Tujuan

tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana Asusila adalah sebagai efek jera bagi para pelaku asusila. Efek jera ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman yang dibuat oleh atasan yang berhak menghukum (ANKUM) berdasarkan hukum disiplin militer yang berlaku. Sejauh ini Pemerintah dan aparat penegak hukum seperti instansi terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijakan, serta pedoman dalam usaha menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.. Semua itu dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi.

2. Pada lokasi penelitian di Datasemen Polisi Militer (DENPOM) melalui wawancara dengan Komandan Bagian Penyidikan Kapten Sumule (tanggal 20/09/2013), menjelaskan bahwa upaya penanggulangannya antara lain :

Upaya Preventif

Pemerintah bersama-sama pihak DENPOM (Detasemen Polisi Militer) saling berkoordinasi dengan KODAM melalui sosialisasi mengenai Hukum Disiplin Militer sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana baik asusila maupun tindak pidana yang lain.

Upaya Represif

Berupa penegakan hukum dengan cara melakukan proses penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban Tindak

Pidana meliputi, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah di lakukannya apabila pelaku terbukti melakukan asusila maka akan di tindak lanjuti menurut hukum, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi kedua belah pihak.

wawancara dengan Komandan unit Penyidikan Kapten Dadang tanggal (27/09/2013), menjelaskan bahwa upaya penanggulangannya antara lain :

Upaya Preventif

Mengadakan penyuluhan hukum, Pemerintah bersama-sama pihak DENPOM (Detasemen Polisi Militer) saling berkoordinasi dengan KODAM melalui sosialisasi hukum, mengingat bahwa tingkat kesadaran hukum masih relative rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan anggota TNI Angkatan Darat dapat memahami bahwa kegiatan yang dapat merugikan orang lain akan dijatuhi hukuman yang diancam oleh undang-undang.

Mengadakan penyuluhan keagamaan. Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan diharapkan agama kepercayaannya semakain kokoh, serta

dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari baik didalam satuan maupun masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana asusila dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif.

Upaya Represif

Meliputi penegakan hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan kejahatan asusila yang meliputi penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana asusila yang dilakukannya apabila pelaku terbukti melakukan kejahatan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat yang terjadi.

Tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan asusila adalah sebagai efek jera bagi para pelaku kejahatan. Efek jera ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman yang dibuat oleh Negara dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Asusila dan Hukum Disiplin yang berlaku para pelaku tindak pidana berfikir untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Sejauh ini Pemerintah dan aparat penegak hukum seperti instansi terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijakan, serta pedoman dalam usaha menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Semua itu dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi.

3. Pada lokasi penelitian di Polisi Militer (POM) melalui wawancara dengan Lettu Cpm Rosichan (02/09/2013), mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana Asusila yaitu melakukan penyuluhan hukum oleh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di setiap satuan khususnya Angkatan Darat guna mengetahui apabila adanya pelanggaran maka hukuman khusus diberikan yaitu pemecatan sehingga dengan adanya pemecatan secara tidak hormat menghindari terjadinya tindakan asusila yang oleh TNI Angkatan Darat.

Di setiap satuan TNI Angkatan Darat selalu mengadakan bintal (pembinaan mental) berupa kegiatan kerohanian atau keagamaan. Setiap hari Kamis malam, setiap satuan TNI Angkatan Darat mengadakan pengajian sebagai salah satu bentuk pembinaan mental. Dan juga mengadakan latihan-latihan fisik sehingga tidak ada pikiran untuk melakukan tindak pidana.

Menurut Lettu Rokhmana, upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu melakukan penyuluhan hukum oleh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di setiap satuan khususnya Angkatan Darat guna mengetahui apabila menyalahgunakan narkoba maka hukuman khusus diberikan yaitu pemecatan sehingga dengan adanya

pemecatan secara tidak hormat menghindari terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh TNI Angkatan Darat.

Di setiap satuan TNI Angkatan Darat selalu mengadakan bintal (pembinaan mental) berupa kegiatan kerohanian atau keagamaan. Setiap hari Kamis malam, setiap satuan TNI Angkatan Darat mengadakan pengajian sebagai salah satu bentuk pembinaan mental. Dan juga mengadakan latihan-latihan fisik sehingga tidak ada pikiran untuk melakukan tindak pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat diantaranya a). Faktor keimanan dan ketaqwaan, b). Faktor lingkungan, c). Faktor pergaulan, d). Faktor teknologi, dan e). Peranan korban.

Upaya penaggulangan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat adakah :

- a. Melalui tindakan preventif memberikan penyuluhan hukum dan keagamaan yang dilakukan setiap pertemuan yang bekerja sama dengan pihak Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di setiap satuan khususnya Angkatan Darat

- b. Melalui tindakan represif

Meliputi penegakan hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan kejahatan asusila yang meliputi penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana asusila yang dilakukannya apabila

pelaku terbukti melakukan kejahatan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat yang terjadi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan saran guna menunjang penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana asusila di lingkungan TNI

Angkatan Darat yaitu Anggota TNI Angkatan Darat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimananan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya..

Menambahkan jumlah personil di bagian penyelidikan sehingga informasi keterlibatan anggota TNI Angkatan Darat mudah diketahui. Selalu mengadakan operasi aktif atau razia yang digelar secara mendadak sehingga Polisi Militer lebih banyak menemukan tindak pidana yang dilakukan dibandingkan operasi aktif atau razia yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Menambah kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian agar anggota TNI Angkatan Darat dapat memperkuat keimanan dan terhindar dari perbuatan yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A, S, dan Ilyas, Amir. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1981, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Anwar. H.A.K., 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Cipta Aditya Bhakti, bandung.
- Bonger. W.A., 1982, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jogjakarta.
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hari, Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta : Aksara Baru.
- Hamzah, Andi, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- _____, 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- J.E. Sahepaty, 1982, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Lamintang, P,A,F, 1984, *Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.
- Marpaung, Leden, 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno, 1985, *Kriminologi*, Jakarta : Bina Aksara.

_____, 1986, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara.

-----, 1999, KUHP, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,
Jakarta : Bumi Aksara.

Mulyana W, Kusuma, 1981, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*,
Bandung : Amirco.

_____, 1982, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup
Kriminologi*, Bandung : Alumni.

Porwadarminta, W.J.S, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta
: Balai Pustaka.

Romli Atmasasmita, 1987, *Capita Selecta Kriminologi*, Bandung :
Armico.

Rusli Effendy, 1983, *Manusia dan Kejahatan, Lembaga Kriminologi*,
Ujung Pandang : Unhas.

Santoso, Topo, dan Achjani Zulfa, Eva,. 2001, *Kriminologi*, Jakarta :
Raja Grafindo Persada.

S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta :
AHM-PTM.

Sjarif, Amiroeddin, 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta:
Rineka Cipta.